

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 6 Nomor 2, Desember 2016

Penanggung Jawab :

Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Anggota:

Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumberdaya*)

Dr. Andy Ahmad Zailany (*Antropologi*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Asep Agus Handaka, S. Pi, MT (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Mitra Bestari :

Dr. Arif Satria (*Kebijakan Kelautan dan Perikanan*)

Dr. Andin H. Taryoto (*Sosiologi Pedesaan*)

Dr. Luky Adrianto (*Ekonomi Ekologi*)

Dr. Fatuchri Sukadi (*Analisis Kebijakan Perikanan*)

Dr. Zuzy Anna (*Ekonomi Sumberdaya*)

Redaksi Pelaksana :

Catur Pramono Adi, M. Si

Andrian Ramadhan, S. Pi, MT

Hertria Maharani Putri, MBA

Hakim Miftahul Huda, M.Si

Asep Jajang Setiadi, S.Pi

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: pt.osek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah terakreditasi berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 482/D/2011 tanggal 12 April 2011; secara spesifik memuat kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1221/E/2016 tertanggal 22 September 2016, telah Terakreditasi dengan Nomor Akreditasi: 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016.

Guna peningkatan nilai akreditasi di masa mendatang maka Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6 No. 2 Tahun 2016 telah mengalami perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan petunjuk dari Tim Akreditasi Jurnal Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI)

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan; (ii) Evaluasi Kesiapan Kota Ambon Dalam Mendukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (iii) Posisi Praktek Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional; (iv) Pengelolaan Budidaya Rumput Laut Berkelanjutan Untuk Masyarakat Pesisir Pulau Panjang Serang, Banten; (v) Kajian Dampak Kebijakan *United States Generalized System of Preference* (US-GSP) 2015 Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia Ke USA; (vi) Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor Usaha Perikanan Tangkap di Kota Bitung; (vii) Bisnis Lobster di Simeulue: Keragaan Perdagangan dan Kebijakan Inovasi Budidaya.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 6 Nomor 2, Tahun 2016

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN	
<i>Oleh : Subhechanis Saptanto, Achmad Zamroni, Andrian Ramadhan dan Rizky Aprilian Wijaya ...</i>	85 - 95
EVALUASI KESIAPAN KOTA AMBON DALAM Mendukung MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL	
<i>Oleh : Yayan Hikmayani dan Siti Hajar Suryawati</i>	97 - 110
POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL	
<i>Oleh : Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Rismutia Hayu Deswati</i>	111 - 122
PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERKELANJUTAN UNTUK Masyarakat Pesisir Pulau Panjang Serang, Banten	
<i>Oleh : Permana Ari Soejarwo dan Widitya Putri Fitrianny</i>	123 - 134
KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN UNITED STATES GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE (US-GSP) 2015 TERHADAP EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA KE USA	
<i>Oleh : Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution</i>	135 - 144
DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG	
<i>Oleh : Nurlaili, Rizky Muhartono dan Yayan Hikmayani</i>	145 - 152
BISNIS LOBSTER DI SIMEULUE: KERAGAAN PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN INOVASI BUDIDAYA	
<i>Oleh : Armen Zulham dan Zahri Nasution</i>	153 - 164

ANALISIS KEBIJAKAN DAMPAK PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN
Analysis of Subsidized Fuel Price Adjustment Policy Impact For Fishers

Subhechanis Saptanto, Achmad Zamroni, Andrian Ramadhan dan Rizky Aprilian Wijaya

ABSTRAK

Fluktuasi harga BBM yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian harga BBM memberikan pengaruh pada berbagai sektor khususnya sektor perikanan tangkap. Tujuan dari penelitian ini mengkaji pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap biaya operasional usaha perikanan tangkap laut; dan mengkaji dampak penyesuaian harga BBM terhadap tingkat keuntungan usaha perikanan tangkap laut. Waktu penelitian dilaksanakan selama 30 hari kerja yang dilakukan pada bulan Januari-Februari 2015. Lokasi penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan, PPN Pekalongan di Kota Pekalongan dan PPN Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat armada kapal berdasarkan ukuran kapal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden/sampel penelitian yang ditentukan secara purposif (*purposive sampling*) mencakup: nelayan pada berbagai ukuran kapal. data-data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, laporan kajian, dan data-data pada berbagai instansi terkait. Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap biaya operasional dan keuntungan usaha. Pada seluruh ukuran kapal peningkatan harga BBM akan secara otomatis meningkatkan biaya operasional usaha dan menurunkan keuntungan usaha. Perubahan harga BBM khususnya solar yang terjadi pada akhir tahun 2014 hingga Januari 2015 memberikan dampak positif dan negatif terhadap pelaku usaha, khususnya nelayan; penurunan harga BBM berpotensi menaikkan tingkat keuntungan yang diterima, sebaliknya peningkatan BBM berpotensi menurunkan tingkat keuntungan usaha. Perlu adanya bantuan permodalan dan pendampingan untuk mendorong pelaku usaha berpindah dari kapal 50-100 GT ke kapal berukuran 20-30 GT atau ke kapal berukuran di atas 100 GT. Hal ini didasarkan pada hasil kajian dimana kelompok ukuran kapal 50-100 GT yang paling sensitif terkena dampak akibat perubahan harga solar. Setiap kenaikan harga BBM solar sebesar 1% akan menurunkan keuntungan usaha sebesar 0,7%. Sementara ukuran kapal 20-30 GT dan di atas 100 GT mengalami penurunan sebesar 0,2% dan 0,5%.

Kata Kunci: BBM, nelayan, analisis usaha, subsidi

ABSTRACT

*Fluctuations in fuel prices caused by the fuel price adjustment policy influence on various sectors particularly the fisheries sector. The purpose of this study was to assess the effect of fuel price adjustments against operating expenses marine capture fishery business; and assess the impact of fuel price adjustments to the level of profitability of marine capture fisheries. The research was carried out for 30 days of work, done in January-February 2015. The research location is at the Fishery Port Beach (PPP) Muncar, Nusantara Fishery Port (VAT) Brondong Lamongan, PPN Pekalongan in Pekalongan and VAT Palabuhan Ratu in Sukabumi, considering that in that location there is a fleet of ships based on ship size. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data obtained from respondents / sample were determined purposively (*purposive sampling*) include: fisherman on vessels of various sizes. secondary data obtained from research reports, assessment reports, and data on the various relevant agencies. Techniques used for primary data collection is interview the selected respondents, with the scope of information covering investment costs, variable costs (*variable*) per trip, the fixed cost (*fixed*) per year, business receipts per trip, business operational information. Data tabulated and analyzed descriptively and presented in a tabular format. The results showed that the adjustment of fuel prices has a profound influence on operating costs and profits. On the whole size of ships increase in fuel prices will automatically increase business operational costs and lowering profits. Changes in fuel prices, especially diesel which occurred in late 2014 to January 2015 giving positive and negative impacts to businesses, especially fishermen fishing; reductions in fuel prices could raise the level of benefits received, otherwise the increase in fuel potentially lower level of profits. The need for capital assistance and mentoring to encourage businesses to move from ship to ship size 50-100 20-30 GT GT or sized vessels above 100 GT. It is based on the results of the study in which groups of vessel sizes 50-100 GT are most sensitive affected by changes in the price of diesel. Any increase in the price of diesel fuel by 1% would reduce the business profits of 0.7%. While the size of 20-30 ships over 100 GT and GT decreased 0.2% and 0.5%.*

Keywords: fuel, fishers, business analysis, subsidies

EVALUASI KESIAPAN KOTA AMBON DALAM Mendukung MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL

Evaluation of Readiness To Support The City Ambon Maluku as Lumbung Ikan Nasional

Yayan Hikmayani dan Siti Hajar Suryawati

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat kesiapan Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) yang dianalisis dengan metode RAPFISH yang dimodifikasi menggunakan *Multi Dimensional Scalling* (MDS). Metode penelitian digunakan yaitu metode survei. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan terhadap responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder berupa laporan diperoleh dari berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Responden terdiri dari pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Maluku (Badan Perencana Daerah, Dinas Kelautan Perikanan), Pemerintah Kota (Badan Perencana Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan). Berdasarkan hasil analisis secara umum Kota Ambon masuk kategori siap sebagai daerah pendukung M-LIN dimana dari 6 dimensi hanya dimensi ekologi dan kelembagaan dan kebijakan yang masuk kategori cukup siap. Untuk meningkatkan kesiapan di Kota Ambon maka dimensi kelembagaan dan kebijakan menjadi dimensi yang paling utama untuk diperhatikan agar jelas mengenai keberlanjutan program M-LIN ini selanjutnya. Dari hasil analisis yang dilakukan berimplikasi pada peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Selain itu juga perlu menyiapkan kebijakan berupa peraturan baik peraturan presiden (Perpres) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) KP yang mendukung pelaksanaan program.

Kata Kunci: Maluku, lumbung ikan nasional, Kota Ambon

ABSTRACT

This paper was aimed to evaluate the readiness level of Ambon city serving as buffer for Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) which analyzed with modified RAPFISH method using Multi Dimensional Scalling (MDS). The study uses survei as the data collection method. This study used primary and secondary data. Primary data were collected through interviews using a set of questionnaires. Examples of secondary data were report or study reports from universities and local government offices. The respondents are fishery business entities, provincial and district fishery offices, provincial planning office. This study finds that in general City Ambon is ready as support system for M-LIN. However, only two out of six categories of readiness are in good condition for readiness. The ready indicators are the governance and policies put in place in Ambon. These two indicators serve as key aspect insuring the sustainability of M-LIN program.

Keywords: Maluku, national fish bank, Ambon City

**POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**
*The Position of Marine and Fisheries Resources Management Practices Based on
Adat Law in National Law Perspective*

Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Rismutia Hayu Deswati

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat masih belum terlihat eksistensinya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan sejauhmana posisi praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis hukum adat dari perspektif perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasis hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat. Oleh karenanya perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukan ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, perlu penjelasan makna "kepentingan nasional" yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu peraturan daerah yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat *trace bundle* mengenai sejarah dan tata hukum adat.

Kata Kunci: hukum adat, legalisasi, undang-undang, pengelolaan sumber daya, perspektif hukum nasional

ABSTRACT

Customary law community has not shown its existence, though the government has enacted several legislations concerning the recognition of the community. This paper aims to provide an explanation regarding the position of marine and fisheries resources management practices based on customary law in national law perspective. The study used a qualitative descriptive analysis and content analysis. The results showed that the recognition is a conditional one and it is inconsistent among laws. There are several contradictions between practices and Law number 27/2007 juncto Law Number 1/2014. They are 1) position of the community role is equivalent to business world, 2) requirements in granting privileges to the customary law community in terms of marine and fisheries resources management are not clearly defined, 3) legalization mechanism of customary law is clearly explained, both customary law community definition and institutions which perform legalization and verification, and 4) the absence of legislation governing the use of the territory of each of indigenous communities. Therefore, it is necessary to determine the proportion of local government, community, and business world involvement. It is also important to determine the community organizations which may be an an inspiration of the community in accordance with Ministerial Regulation Number 40/2014. Besides that, it needs an explanation of the meaning of "national interest" which is a prerequisite to indigenous communities in order to have marine and fisheries resources management rights. Furthermore, it is important to determine the customary law community verifier institutions. Other than that, setting regional regulations governing borders of each customary law community territory is needed. Last, creating a trace bundle concerning history and customary law system is also necessary.

Keywords: *customary law, legalization, legislation, resource management, national legal perspective*

**PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT
PESISIR PULAU PANJANG SERANG, BANTEN**

***The Sustainable Seaweed Farming Management For Coastal Community
in Pulau Panjang, Serang Banten***

Permana Ari Soejarwo dan Widitya Putri Fitriyanny

ABSTRAK

Budidaya rumput laut merupakan salah satu mata pencaharian yang potensial di wilayah pesisir Pulau Panjang. Oleh karena itu kegiatan ini harus dikelola secara optimal dari berbagai dimensi diantaranya yaitu dimensi lingkungan, teknologi, sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan usaha budidaya rumput laut yang berkelanjutan dengan menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling dominan dari kondisi aktual pada komponen kekuatan yaitu kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut dan keterlindungan perairan dengan skor 0,80. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling dominan yaitu keterbatasan modal dengan skor 0,20 dan atribut sarana pengeringan rumput laut dengan skor 0,02. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peningkatan pendapatan pembudidaya dan potensi pasar rumput laut dengan skor 0,80. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling dominan yaitu pencemar logam berat dengan skor 0,20 dan pencemar limbah domestik dengan skor 0,10. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut di Pulau Panjang berada pada kuadran 1 strategi SO (*maxi-maxi strategy*). Strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan industri pengolahan, melakukan pembinaan dan pengawasan pemilihan material serta teknik budidaya rumput laut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, meningkatkan pengolahan pasca panen, memperkuat pembinaan dan bimbingan teknis bagi pembudidaya dalam memilih bibit rumput laut berkualitas tinggi serta memperkuat kebijakan mengenai ketersediaan jaminan modal usaha melalui pengembangan sistem peminjaman modal dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan untuk pembudidaya.

Kata Kunci: keberlanjutan, Pulau Panjang rumput laut, strategi, SWOT

ABSTRACT

*Seaweed farming is one of the potential livelihood in coastal area of Pulau Panjang. Therefore this activity must be managed optimally from several dimensions such as environment, technology, social and economic. This study aimed to determine the strategy of sustainable seaweed farming management by using SWOT. The result showed that the most dominant attributes in actual condition on strength component were water suitability for seaweed farming and protection level of sea water with score 0.80. While in the weakness component, the most dominant attributes were limited capital with score 0.20 and seaweed drying facilities with score 0.02. For opportunities component, the most dominant attributes were the increase of seaweed farmer income and potential of seaweed market with score 0.80. While in the threat component, the most dominant attributes were heavy metal pollution with score 0.20 and domestic waste pollutant with score 0.10. This study showed that strategy of sustainable seaweed farming management was located in quadrant 1 SO (*maxi-maxi strategy*). Strategy of sustainable seaweed farming management can be conducted by increased the cooperation between processing industry, development and control of material and farming technique selection that appropriate with Indonesia National Standard, increased post harvesting processing, strengthened development and technical guidance for seaweed farmer to choose a high quality seaweed seeds and strengthened policy about availability of capital guarantee through development of capital loan system with easy requirements and low interest for seaweed farmer.*

Keywords: sustainability, Pulau Panjang, seaweed, strategy, SWOT

KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN *UNITED STATES GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE (US-GSP) 2015* TERHADAP EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA KE USA

The Impact of United States Generalized System of Preference (US-GSP) Toward Indonesia Fisheries Exports to USA

Rikrik Rahadian, Tajerin dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Sejak pertamakali diperkenalkan pada tahun 1970-an, *Generalized System of Preference (GSP)* telah diterapkan oleh negara-negara maju seperti United States of America (USA), Jepang dan European Union (EU). Meskipun bertujuan serupa, yaitu mendorong serta memfasilitasi perdagangan bagi negara-negara berkembang, namun pada penerapannya di masing-masing negara terdapat perbedaan pengaturan GSP – terutama terkait perihal daftar *beneficiaries* (Negara Penerima Manfaat) serta produk yang memperoleh fasilitas GSP. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan US-GSP 2015 serta menganalisis besaran dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja ekspor produk Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia di pasar ekspor USA. Untuk tujuan tersebut maka telah dilakukan pengumpulan data perdagangan produk KP di USA pada tahun 2014 dari database TRAIN-UNCTAD dan simulasi dengan mempergunakan model SMART yang dikembangkan oleh World Integrated Trade Solutions (WITS). Hasil simulasi menunjukkan bahwa rejim US-GSP 2015 dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia ke USA, terutama bagi komoditas sekunder/olahan. Oleh karena itu, kebijakan ekspor produk perikanan Indonesia harus difokuskan terhadap Industrialisasi sektor perikanan Indonesia.

Kata Kunci: *generalized system of preference, USA, ekspor produk perikanan*

ABSTRACT

Ever since its introduction in the early 70's, the *Generalized System of Preference (GSP)* has been adopted and implemented by the developed countries such as United States of America (USA), Japan and the European Union (EU). Despite its only purpose – encouraging and facilitating trade for the developing countries – its implementation in each adopting country has been very customized – especially concerning the beneficiary list and GSP product list. The purpose of this paper is to analyze the impacts of US-GSP 2015 implementation towards Indonesian Fisheries Export to the USA. The research was conducted using a SMART model – an economic model developed by the World Integrated Trade Solution (WITS) – to simulate the impacts of the trade policy using the TRAIN-UNCTAD database. The simulation showed that the 2015 US-GSP regime, if completely utilized by the Indonesian Exporters, could actually boost Indonesian Fisheries Exports to the USA, especially for the fish processing products. Therefore, fisheries product export policy should be focused on industrializing the Indonesian fishery sector.

Keywords: *generalized system of preference, USA, fisheries product export*

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG

Policy Impact Moratorium on Business Fisheries Sector in Bitung

Nurlaili, Rizky Muhartono dan Yayan Hikmayani

ABSTRAK

Kebijakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal-kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan kajian khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap eks kapal asing berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya *fishing ground*, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.

Kata Kunci: moratorium, dampak kebijakan, nelayan kecil, Bitung

ABSTRACT

Termination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.

Keywords: *termination of the licensing policy, positive impact, small scale fishery, Bitung*

**BISNIS LOBSTER DI SIMEULUE:
KERAGAAN PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN INOVASI BUDIDAYA**
Lobster Business in Simeulue: Trade Performed and Cultivation Innovation Policy

Armen Zulham dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Lobster merupakan salah satu komoditas penopang ekonomi rumah tangga perikanan di Simeulue. Disparitas harga Lobster antara Simeulue dan Jakarta mendorong dinamika eksploitasi populasi Lobster di Simeulue. Manfaat ekonomi dari dinamika itu yang diperoleh Nelayan dan Pedagang Pengumpul di Simeulue masing-masing sekitar 19% dari total nilai transaksi Rp. 914,1 Juta setiap bulan. Oleh sebab itu, keberlanjutan usaha dan inovasi budidaya Lobster menjadi fokus dari tulisan ini. Informasi bisnis Lobster diperoleh dari hasil survey pada bulan April 2016. Survey dilakukan pada 15 Pedagang Pengumpul di Teupah Selatan dan 3 Pedagang Besar (antar pulau) di Sinabang dan Teluk Dalam. Informasi tambahan diperoleh melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan sampai bulan Oktober 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan: penangkapan Lobster ukuran karapas < 8 Cm (< 2 gram) dan bertelur masih tetap ditemukan. Suplai Lobster asal Simeulue ke pasar tujuan sekitar 2,4 Ton per Bulan dan kemampuan suplai itu terus menurun dari Januari 2016 sampai Juli 2016. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan untuk memacu produksi Lobster tersebut. Untuk mendapatkan Lobster Pedagang Besar (antar pulau) membangun jaringan sosial, agar bisnis Lobster tetap berlanjut. Namun, keberlanjutan bisnis Lobster itu, tergantung pada kemauan untuk mengimplementasikan model sosial entrepreneur dalam bisnis Lobster tersebut. Kebijakan tersebut pada dasarnya untuk: mempercepat penggunaan teknologi baru (renovasi teknologi) pada budidaya Lobster, menciptakan iklim usaha tentang pentingnya pemulihan stok Lobster melalui asistensi bisnis. Peningkatan produksi Lobster melalui Model Sosial Entrepreneur, dilakukan melalui pembentukan kluster budidaya Lobster di perairan Teluk Sibigo dan Teluk Dalam serta pada sebagian perairan di Teupah Selatan.

Kata Kunci: lobster, Simeulue, perdagangan, kebijakan inovasi, sosial entrepreneur

ABSTRACT

Lobster is one of the commodities that support fisheries household economy in Simeulue. The disparity of lobster prices between Simeulue and Jakarta trigger the dynamism of Lobster population exploitation in Simeulue. Economical benefit from the exploitation of Lobster potency obtained by fishermen and collecting traders in Simelue are around 19% each, from the monthly transaction of Rp 914,1 million, respectively. Hence, the sustainability of the Lobster cultivation business and innovation became the focus of this analysis. Information on Lobster business was obtained from survey conducted on April 2016. Survey was carried out for 15 Collecting Traders in South Teupah Distric and three Inter Island Traders in Sinabang and Teluk Dalam. Additional information was obtained from discussion with stakeholders until October 2016. This research showed that: the fishing of Lobster with carapace size <8 cm and hatching eggs were still found. The supply of Simeulue Lobster to target market was around 2,4 tons per month and found to decreasing since January 2016 to July 2016. An innovation to increase the production level of Lobster is needed. To provide the Lobsters, the Inter Island Traders build social network in order to make his business continue. However, the continuation of lobster business depends on the implementation policy of social entrepreneur innovation model in lobster business. The policy was basically made for: accelerating new technology use (technology renovation) of lobster cultivation, creating a business climate about the importance of lobster stock recovery through business assistance. The increase of Lobster production through social entrepreneur model will be conducted by developing lobster cultivation cluster in Sibigo Bay and Teluk Dalam Bay as well as some coastal waters area in South Teupah Distric.

Keywords: lobster, Simeulue, trade, innovation policy, social entrepreneur